

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

Bab I
Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2023; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2023.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal non keuangan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan informasi relevan lainnya.

BAB V PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab II
Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0.00	0.00	-
BELANJA	17,003,466,673.00	16,283,973,216.00	95.77
Surplus (defisit)	(17,003,466,673.00)	(16,283,973,216.00)	95.77

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023

Uraian	2022	2023	%
PENDAPATAN	0.00	0.00	-
BELANJA	13,909,435,186.00	16,283,973,216.00	117.07
Surplus (defisit)	(13,909,435,186.00)	(16,283,973,216.00)	117.07

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target sebesar Rp 0,00 naik 0% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0,00.

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 16.283.973.216,00 atau 95,77% dari target sebesar Rp 17.003.466.673,00 naik 117,07% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 13.909.435.186,00

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pajak Daerah mempunyai kontribusi sebesar xx%, Retribusi Daerah sebesar xx%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar xx% serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar xx%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp xx meningkat sebesar xx% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp xx. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	NIHIL			
	Pendapatan Daerah				

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	2022	2023	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	NIHIL		
	Pendapatan Daerah			

2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 96,41%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 15.701.978.973,00 atau sebesar 95,84% dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 16.383.991.673,00 meningkat sebesar -120,14% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 13.069.719.086,00.

Belanja Modal meliputi Belanja Peralatan dan Mesin dan Belanja Gedung dan Bangunan. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 3,59%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 584.994.243,00 atau sebesar 93,68% dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 624.475.000,00 meningkat sebesar 69,67% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 839.716.100,00. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Belanja Operasi	16,383,991,673.00	15,701,978,973.00	95.84	96.41
	Belanja Pegawai	4,939,466,000.00	4,707,479,987.00	95.30	28.90
	Belanja Barang dan Jasa	11,444,525,673.00	10,994,498,986.00	96.07	67.50
	Belanja Hibah				
	Belanja Bantuan Sosial				
2	Belanja Modal	624,475,000.00	584,994,243.00	93.68	3.59
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin	226,475,000.00	218,056,660.00	96.28	1.34
	Belanja Gedung dan Bangunan	398,000,000.00	366,937,583.00	92.20	2.25
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
	Belanja Aset Tetap Lainnya				
	Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja		17,008,466,673.00	16,286,973,216.00	95.76	100.00

Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	2022	2023	(%)
1	Belanja Operasi	13,069,719,086.00	15,701,978,973.00	120.14
	Belanja Pegawai	4,564,737,147.00	4,707,479,987.00	103.13
	Belanja Barang dan Jasa	8,504,981,939.00	10,994,498,986.00	129.27
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
2	Belanja Modal	839,716,100.00	584,994,243.00	69.67
	Belanja Tanah			
	Belanja Peralatan dan Mesin	541,872,100.00	218,056,660.00	40.24
	Belanja Gedung dan Bangunan	297,844,000.00	366,937,583.00	123.20
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	Belanja Modal Aset Lainnya			
Jumlah Belanja		13,909,435,186.00	16,286,973,216.00	117.09

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,809,770,579.00	6,514,678,261.00	95.67%	40.01%
	Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150,618,250.00	148,727,750.00	98.74%	0.91%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139,788,250.00	137,901,750.00	98.65%	0.85%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,450,000.00	1,450,000.00	100.00%	0.01%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,450,000.00	1,450,000.00	100.00%	0.01%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	530,000.00	530,000.00	100.00%	0.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	530,000.00	530,000.00	100.00%	0.00%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,500,000.00	4,496,000.00	99.91%	0.03%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,370,000.00	2,370,000.00	100.00%	0.01%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,943,470,000.00	4,713,480,987.00	95.35%	28.95%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,934,466,000.00	4,704,479,987.00	95.34%	28.89%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,158,000.00	1,155,000.00	99.74%	0.01%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,233,000.00	2,233,000.00	100.00%	0.01%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,058,000.00	1,058,000.00	100.00%	0.01%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	539,000.00	539,000.00	100.00%	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,156,000.00	3,156,000.00	100.00%	0.02%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	860,000.00	860,000.00	100.00%	0.01%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	264,168,784.00	264,017,284.00	99.94%	1.62%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	980,000.00	973,500.00	99.34%	0.01%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	260,198,784.00	260,198,784.00	100.00%	1.60%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1,740,000.00	1,731,000.00	99.48%	0.01%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,250,000.00	1,114,000.00	89.12%	0.01%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,450,000.00	1,277,000.00	88.07%	0.01%
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,450,000.00	1,277,000.00	88.07%	0.01%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	521,518,545.00	511,216,771.00	98.02%	3.14%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,902,350.00	8,831,000.00	99.20%	0.05%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126,273,445.00	125,950,445.00	99.74%	0.77%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31,194,250.00	27,438,250.00	87.96%	0.17%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,908,000.00	1,908,000.00	100.00%	0.01%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	336,027,000.00	330,770,576.00	98.44%	2.03%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17,213,500.00	16,318,500.00	94.80%	0.10%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198,575,000.00	190,656,660.00	96.01%	1.17%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	198,575,000.00	190,656,660.00	96.01%	1.17%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188,020,000.00	186,836,626.00	99.37%	1.15%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	0.02%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185,020,000.00	183,836,626.00	99.36%	1.13%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541,950,000.00	498,465,183.00	91.98%	3.06%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28,700,000.00	26,259,700.00	91.50%	0.16%

Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107,350,000.00	84,497,483.00	78.71%	0.52%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,900,000.00	9,675,000.00	46.29%	0.06%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	385,000,000.00	378,033,000.00	98.19%	2.32%
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2,381,372,624.00	2,241,070,468.00	94.11%	13.76%
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2,381,372,624.00	2,241,070,468.00	94.11%	13.76%
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	267,490,000.00	256,201,750.00	95.78%	1.57%
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	328,254,850.00	322,345,000.00	98.20%	1.98%
Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	385,115,000.00	358,579,083.00	93.11%	2.20%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	788,698,654.00	771,309,000.00	97.80%	4.74%
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	611,814,120.00	532,635,635.00	87.06%	3.27%
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4,826,149,970.00	4,608,852,601.00	95.50%	28.30%
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya TarikDestinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4,826,149,970.00	4,608,852,601.00	95.50%	28.30%
Penguatan Promosi melalui Media CetakElektronikdan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	413,020,000.00	400,270,000.00	96.91%	2.46%
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	3,270,302,400.00	3,070,874,167.00	93.90%	18.86%
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaBaik Dalam dan Luar Negeri	1,036,767,570.00	1,031,648,434.00	99.51%	6.34%
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	106,060,000.00	106,060,000.00	100.00%	0.65%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2,986,173,500.00	2,919,371,886.00	97.76%	17.93%
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2,986,173,500.00	2,919,371,886.00	97.76%	17.93%
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	248,307,000.00	247,677,000.00	99.75%	1.52%
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1,107,742,500.00	1,100,757,500.00	99.37%	6.76%
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	238,110,000.00	236,960,000.00	99.52%	1.46%
Fasilitasi Proses KreasiProduksiDistribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1,197,079,000.00	1,143,439,000.00	95.52%	7.02%
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	194,935,000.00	190,538,386.00	97.74%	1.17%
Jumlah Belanja	17,003,466,673.00	16,283,973,216.00	95.77%	

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	2022	2023	(%)

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6,205,059,628.00	6,514,678,261.00	104.99%
1	KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,143,600.00	148,727,750.00	1051.56%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,946,000.00	137,901,750.00	1985.34%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,160,000.00	1,450,000.00	67.13%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1,450,000.00	0.00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	530,000.00	0.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	530,000.00	0.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,497,600.00	4,496,000.00	99.96%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	540,000.00	2,370,000.00	438.89%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,569,609,147.00	4,713,480,987.00	103.15%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,564,737,147.00	4,704,479,987.00	103.06%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	675,000.00	1,155,000.00	171.11%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,017,000.00	2,233,000.00	219.57%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	800,000.00	1,058,000.00	132.25%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	600,000.00	539,000.00	89.83%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	870,000.00	3,156,000.00	362.76%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	910,000.00	860,000.00	94.51%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	264,017,284.00	0.00%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	973,500.00	0.00%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	260,198,784.00	0.00%
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	1,731,000.00	0.00%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1,114,000.00	0.00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1,277,000.00	0.00%
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	1,277,000.00	0.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	467,433,150.00	511,216,771.00	109.37%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,045,000.00	8,831,000.00	109.77%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88,268,650.00	125,950,445.00	142.69%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,448,600.00	27,438,250.00	122.23%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,072,000.00	1,908,000.00	92.08%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346,598,900.00	330,770,576.00	95.43%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	16,318,500.00	0.00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	303,654,400.00	190,656,660.00	62.79%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	303,654,400.00	190,656,660.00	62.79%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391,925,951.00	186,836,626.00	47.67%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	3,000,000.00	60.00%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	372,154,571.00	183,836,626.00	49.40%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14,771,380.00	-	0.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	458,293,380.00	498,465,183.00	108.77%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26,493,418.00	26,259,700.00	99.12%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71,060,962.00	84,497,483.00	118.91%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,057,000.00	9,675,000.00	80.24%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	348,682,000.00	378,033,000.00	108.42%
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,752,078,846.00	2,241,070,468.00	127.91%
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,752,078,846.00	2,241,070,468.00	127.91%
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	108,917,180.00	256,201,750.00	235.23%
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	482,385,305.00	322,345,000.00	66.82%
Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	438,276,180.00	358,579,083.00	81.82%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	326,215,000.00	771,309,000.00	236.44%
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	396,285,181.00	532,635,635.00	134.41%
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3,845,982,333.00	4,608,852,601.00	119.84%
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3,845,982,333.00	4,608,852,601.00	119.84%
Penguatan Promosi melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	459,620,000.00	400,270,000.00	87.09%
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	2,364,457,006.00	3,070,874,167.00	129.88%
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	918,340,952.00	1,031,648,434.00	112.34%
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	103,564,375.00	106,060,000.00	102.41%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2,106,314,379.00	2,919,371,886.00	138.60%
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2,106,314,379.00	2,919,371,886.00	138.60%
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	244,710,167.00	247,677,000.00	101.21%
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1,041,261,212.00	1,100,757,500.00	105.71%

Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	117,900,000.00	236,960,000.00	200.98%
Fasilitasi Proses Kreasi/Produksi/Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	218,243,000.00	1,143,439,000.00	523.93%
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	484,200,000.00	-	0.00%
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	190,538,386.00	0.00%
Jumlah Belanja	13,909,435,186.00	16,283,973,216.00	117.07%

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1.1	Pendapatan - LRA	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	Rincian Objek	-	-
	Penjelasan :		
	Tidak ada Pendapatan di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		
3.1.2	Belanja	Realisasi Desember 2023 (Rp)	Realisasi Desember 2022 (Rp)
	BELANJA DAERAH	16,283,973,216.00	13,909,435,186.00
	BELANJA OPERASI	15,698,978,973.00	13,069,719,086.00
	Belanja Pegawai	4,704,479,987.00	4,564,737,147.00
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,118,931,238.00	2,029,670,813.00
	Belanja Gaji Pokok ASN	1,501,026,899.00	1,416,177,660.00
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	104,652,206.00	104,124,128.00
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	115,990,000.00	120,590,000.00
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	108,480,000.00	110,870,000.00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35,715,000.00	29,830,000.00
	Belanja Tunjangan Beras ASN	69,668,040.00	68,799,000.00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	33,956,678.00	35,018,017.00
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19,018.00	19,746.00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	137,075,868.00	132,627,686.00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3,086,865.00	2,903,618.00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9,260,664.00	8,710,958.00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,585,548,749.00	2,535,066,334.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	661,006,874.00	648,976,003.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	152,481,939.00	142,760,283.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	780,465,737.00	769,779,597.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	991,594,199.00	973,550,451.00
	Belanja Barang dan Jasa	10,994,498,986.00	8,504,981,939.00
	Belanja Barang	1,763,922,523.00	1,625,681,902.00
	Belanja Barang Pakai Habis	1,763,922,523.00	1,625,681,902.00
	Belanja Jasa	7,830,359,844.00	5,609,399,376.00
	Belanja Jasa Kantor	3,735,126,394.00	4,046,608,781.00
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	-	5,553,964.00
	Belanja Sewa Tanah	111,000,000.00	58,500,000.00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2,390,668,000.00	1,164,097,000.00
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	69,400,000.00	33,400,000.00
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	37,355,000.00
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1,524,165,450.00	263,884,631.00

Belanja Pemeliharaan	245,273,005.00	328,770,255.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36,980,005.00	39,593,655.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	208,293,000.00	289,176,600.00
Belanja Perjalanan Dinas	1,096,643,614.00	867,130,406.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,076,507,286.00	846,871,306.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	20,136,328.00	20,259,100.00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	58,300,000.00	74,000,000.00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	58,300,000.00	74,000,000.00
BELANJA MODAL	584,994,243.00	839,716,100.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	218,056,660.00	541,872,100.00
Belanja Modal Alat Besar	-	2,990,000.00
Belanja Modal Alat Bantu	-	2,990,000.00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	810,000.00	-
Belanja Modal Alat Ukur	810,000.00	-
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22,896,660.00	97,659,600.00
Belanja Modal Alat Kantor	3,000,000.00	52,726,800.00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	19,896,660.00	19,535,000.00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	25,397,800.00
Belanja Modal Alat Studio/Komunikasi dan Pemancar	34,400,000.00	38,752,000.00
Belanja Modal Alat Studio	10,400,000.00	35,953,000.00
Belanja Modal Alat Komunikasi	24,000,000.00	2,799,000.00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	600,000.00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	-	600,000.00
Belanja Modal Komputer	159,950,000.00	227,071,500.00
Belanja Modal Komputer Unit	136,060,000.00	177,037,900.00
Belanja Modal Peralatan Komputer	23,890,000.00	50,033,600.00
Belanja Modal Rambu-Rambu	-	174,799,000.00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	-	174,799,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	366,937,583.00	297,844,000.00
Belanja Modal Bangunan Gedung	366,937,583.00	297,844,000.00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	366,937,583.00	297,844,000.00

Penjelasan :

Uraikan realisasi belanja per Rincian Objek belanja, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa dapat tercapai atau mengapa tidak tercapai.

3.1.3	Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan-LO Per 30 Juni 2023 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)
	Pendapatan	-	-

Penjelasan :

Uraikan realisasi pendapatan LO per Rincian Objek pendapatan LO, Jelaskan masing-masing apabila terjadi perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

3.1.4	Beban	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)
	<u>BEBAN DAERAH</u>	16,218,535,343.82	13,567,457,184.21
	<u>BEBAN OPERASI</u>	15,709,681,746.00	13,567,457,184.21
	Beban Pegawai	4,704,479,987.00	4,564,737,147.00
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2,118,931,238.00	2,029,670,813.00
	Beban Gaji Pokok ASN	1,501,026,899.00	1,416,177,660.00
	Beban Tunjangan Keluarga ASN	104,652,206.00	104,124,128.00
	Beban Tunjangan Jabatan ASN	115,990,000.00	120,590,000.00
	Beban Tunjangan Fungsional ASN	108,480,000.00	110,870,000.00
	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	35,715,000.00	29,830,000.00
	Beban Tunjangan Beras ASN	69,668,040.00	68,799,000.00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	33,956,678.00	35,018,017.00
	Beban Pembulatan Gaji ASN	19,018.00	19,746.00

Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	137,075,868.00	132,627,686.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3,086,865.00	2,903,618.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	9,260,664.00	8,710,958.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	2,585,548,749.00	2,535,066,334.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	661,006,874.00	648,976,003.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	152,481,939.00	142,760,283.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanKelangkaan Profesi ASN	780,465,737.00	769,779,597.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	991,594,199.00	973,550,451.00
Beban Barang dan Jasa	11,005,201,759.00	8,393,984,786.00
Beban Barang	1,780,265,316.00	1,563,318,187.00
Beban Barang Pakai Habis	1,780,265,316.00	1,563,318,187.00
Beban Jasa	7,830,219,824.00	5,609,658,438.00
Beban Jasa Kantor	3,734,986,374.00	4,046,867,843.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	-	5,553,964.00
Beban Sewa Tanah	111,000,000.00	58,500,000.00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2,390,668,000.00	1,164,097,000.00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	69,400,000.00	33,400,000.00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-	37,355,000.00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1,524,165,450.00	263,884,631.00
Beban Pemeliharaan	239,773,005.00	279,877,755.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36,980,005.00	39,593,655.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	202,793,000.00	240,284,100.00
Beban Perjalanan Dinas	1,096,643,614.00	867,130,406.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,076,507,286.00	846,871,306.00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	20,136,328.00	20,259,100.00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	58,300,000.00	74,000,000.00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	58,300,000.00	74,000,000.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	508,853,597.82	608,735,251.21
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	428,444,773.38	494,383,743.43
Beban Penyusutan Alat Besar	3,605,714.29	3,998,252.29
Beban Penyusutan Alat Bantu	3,605,714.29	-
Beban Penyusutan Alat Besar Darat	-	3,998,252.29
Beban Penyusutan Alat Angkutan	75,168,157.96	77,101,352.96
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	75,168,157.96	77,101,352.96
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	81,000.00	-
Beban Penyusutan Alat Ukur	81,000.00	-
Beban Penyusutan Alat Pertanian	250,000.00	250,000.00
Beban Penyusutan Alat Pengolahan	250,000.00	250,000.00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	222,579,143.07	319,091,254.68
Beban Penyusutan Alat Kantor	138,321,105.81	319,091,254.68
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	74,694,977.26	-
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9,563,060.00	-
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15,942,420.00	13,243,136.00
Beban Penyusutan Alat Studio	12,982,620.00	13,243,136.00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	2,959,800.00	-
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	7,320,000.00	7,320,000.00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	7,320,000.00	7,320,000.00
Beban Penyusutan Komputer	103,498,338.06	73,379,747.50
Beban Penyusutan Komputer Unit	84,022,764.06	-
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	19,475,574.00	73,379,747.50
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24,749,491.10	22,268,841.10
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	24,749,491.10	22,268,841.10
Bangunan Gedung Tempat Kerja	24,749,491.10	22,268,841.10
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	55,659,333.34	92,082,666.68
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	55,659,333.34	92,082,666.68
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	55,659,333.34	92,082,666.68

Penjelasan realisasi :

Uraikan realisasi beban LO per Rincian Objek beban LO, Jelaskan masing-masing apabila terjadi perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

3.1.5 Aset	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
ASET	2,037,152,432.00	2,456,287,089.05
ASET LANCAR	111,088,222.00	127,431,015.00
Kas dan Setara Kas	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Persediaan	111,088,222.00	127,431,015.00
Barang Pakai Habis	111,088,222.00	127,431,015.00
Alat Tulis Kantor	9,495,922.00	3,173,265.00
Kertas dan Cover	5,272,000.00	436,250.00
Bahan Cetak	17,639,500.00	52,825,500.00
Benda Pos	380,000.00	-
Bahan Komputer	24,009,500.00	8,400,000.00
Perabot Kantor	11,154,300.00	6,571,000.00
Alat Listrik	5,145,000.00	3,985,000.00
Perlengkapan Dinas	37,680,000.00	51,840,000.00
Suvenir/Cendera Mata	-	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	200,000.00
Obat	312,000.00	-
ASET TETAP	1,827,566,210.00	2,174,698,740.73
Peralatan dan Mesin	3,210,520,332.11	3,516,558,404.26
Alat Besar	30,800,265.79	29,482,765.79
Pompa	20,100,000.00	2,990,000.00
Alat Bantu Lainnya	10,700,265.79	26,492,765.79
Alat Angkutan	889,854,277.30	889,854,277.30
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	801,723,169.60	35,000,000.00
Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	88,131,107.70	854,854,277.30
Alat Bengkel dan Alat Ukur	810,000.00	-
Alat Ukur Universal	810,000.00	-
Alat Pertanian	1,000,000.00	1,000,000.00
Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1,000,000.00	-
Alat Pengolahan Lainnya	-	1,000,000.00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,545,315,454.41	1,992,034,733.92
Mesin Ketik	3,937,400.00	-
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	4,751,165.92	-
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	234,026,736.12	-
Alat Kantor Lainnya	675,598,019.72	459,219,269.04
Mebel	168,331,482.77	7,500,000.00
Alat Pendingin	81,095,560.91	-
Alat Dapur	10,481,854.81	2,000,000.00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	314,331,774.16	1,471,102,364.88
Alat Pemadam Kebakaran	4,946,160.00	-
Meja Kerja Pejabat	21,000,000.00	21,000,000.00
Meja Rapat Pejabat	-	26,815,300.00
Kursi Kerja Pejabat	23,325,000.00	4,397,800.00
Lemari dan Arsip Pejabat	3,490,300.00	-
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	106,446,555.78	94,986,864.33
Peralatan Studio Audio	6,973,100.00	6,993,000.00
Peralatan Studio Video dan Film	69,324,455.78	15,992,000.00
Alat Studio Lainnya	-	60,882,893.94
Alat Komunikasi Telephone	30,149,000.00	2,799,000.00
Alat Komunikasi Lainnya	-	8,319,970.39
Alat Kedokteran dan Kesehatan	36,600,000.00	36,600,000.00
Alat Kedokteran Lainnya	-	36,000,000.00
Alat Kedokteran Umum	36,600,000.00	-
Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	600,000.00
Komputer	599,693,778.83	472,599,762.92
Komputer Jaringan	6,950,000.00	-
Personal Computer	491,889,696.24	177,037,900.00
Peralatan Personal Computer	76,964,082.59	-
Komputer Unit Lainnya	-	227,801,140.33
Peralatan Komputer Lainnya	23,890,000.00	67,760,722.59
Gedung dan Bangunan	1,025,913,202.26	832,173,202.26
Bangunan Gedung	1,025,913,202.26	832,173,202.26
Bangunan Gedung Kantor	593,747,817.56	699,302,817.56
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	99,944,000.00	99,944,000.00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	32,926,384.70	32,926,384.70
Bangunan Fasilitas Umum	299,295,000.00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	180,000,000.00	180,000,000.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	180,000,000.00	180,000,000.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	180,000,000.00	180,000,000.00
Akumulasi Penyusutan	(2,588,867,324.37)	(2,354,032,865.79)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2,148,415,269.90)	(2,186,672,770.88)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(14,357,142.86)	-

Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(5,900,980.08)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Alat Besar Darat Lainnya	-	(17,497,051.53)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(746,008,883.89)	(718,427,048.30)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(86,136,998.81)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	(38,550,676.48)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(81,000.00)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan- Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(625,000.00)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	-	(125,000.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan- Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	-	(125,000.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan- Alat Pengolahan Lainnya	-	(125,000.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(3,937,400.00)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(4,751,165.92)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(200,483,976.12)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(219,872,657.71)	(1,058,864,162.82)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(137,803,022.77)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	(65,728,060.91)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Alat Dapur	(5,491,854.81)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(209,526,874.16)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Alat Pemadam Kebakaran	(494,616.00)	-
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(8,400,000.00)	-
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(11,662,500.00)	-
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(1,745,150.00)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Studio- Peralatan Studio Audio	(3,938,860.00)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film	(54,194,455.78)	(55,597,538.33)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-	(6,761,518.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	(6,589,700.00)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Umum	(29,040,000.00)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Lainnya	-	(21,720,000.00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit- Komputer Jaringan	(6,950,000.00)	-
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit- Personal Computer	(274,111,402.49)	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(47,083,567.59)	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	(3,500,000.00)	(268,879,775.42)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(440,452,054.47)	(167,360,094.91)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(432,075,156.00)	(167,360,094.91)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(3,997,760.00)	-

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(3,292,638.47)	-
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(1,086,500.00)	-
ASET LAINNYA	98,498,000.00	154,157,333.32
Aset Tidak Berwujud	365,128,000.00	365,128,000.00
Aset Tidak Berwujud	365,128,000.00	365,128,000.00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	365,128,000.00	365,128,000.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(266,630,000.00)	(210,970,666.68)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(266,630,000.00)	(210,970,666.68)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-	(266,630,000.00)	(210,970,666.68)

Penjelasan :

Uraikan per Rincian Objek Aset, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Aset selama tahun berjalan.

3.1.6 Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
KEWAJIBAN	119,042.00	259,062.00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	119,042.00	259,062.00
Utang Belanja	119,042.00	259,062.00
Utang Belanja Barang dan Jasa	119,042.00	259,062.00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	119,042.00	259,062.00

Penjelasan :

Uraikan per Rincian Objek Kewajiban, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Kewajiban selama tahun berjalan.

3.1.7 Ekuitas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
EKUITAS	2,037,033,390.00	2,456,028,027.05
EKUITAS	2,037,033,390.00	2,456,028,027.05
Ekuitas	(13,762,507,316.77)	(10,923,933,202.31)
Ekuitas	2,456,028,027.05	2,643,523,981.90
Ekuitas	2,456,028,027.05	2,643,523,981.90
Surplus/Defisit-LO	(16,218,535,343.82)	(13,567,457,184.21)
Surplus/Defisit-LO	(16,218,535,343.82)	(13,567,457,184.21)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	16,283,973,216.00	13,909,435,186.00
RK PPKD	16,283,973,216.00	13,909,435,186.00
RK PPKD	16,283,973,216.00	13,909,435,186.00
Ekuitas Mutasi	(484,432,509.23)	(529,473,956.64)
Ekuitas Mutasi	(484,432,509.23)	(529,473,956.64)
Ekuitas Mutasi Aset Tetap	(232,369,200.00)	(577,279,492.52)
Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	(247,125,181.94)	47,805,535.88
Ekuitas Mutasi Aset Lainnya	(4,938,127.31)	-
Ekuitas Mutasi Amortisas	0.02	-

Penjelasan :

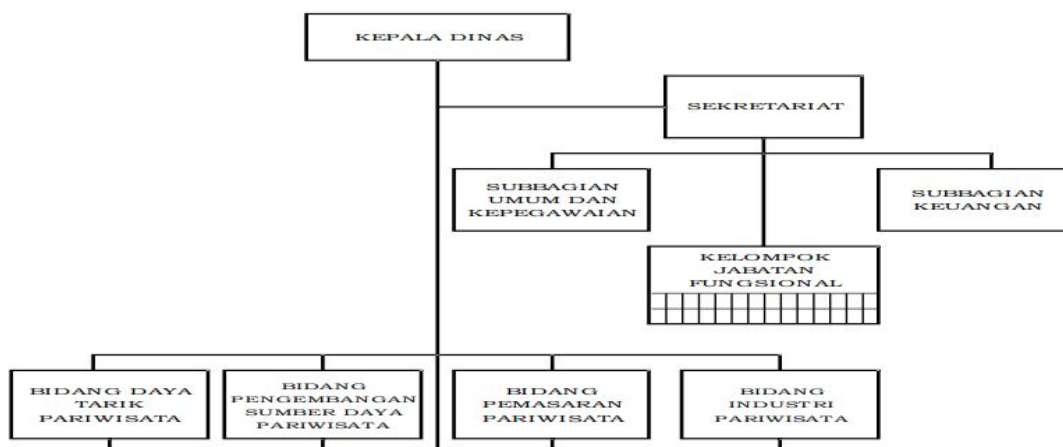
Uraikan per Rincian Objek Ekuitas, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Ekuitas selama tahun berjalan.

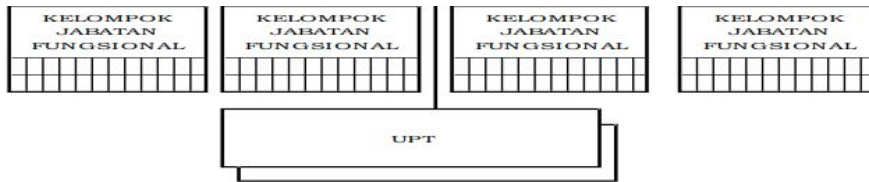
Bab IV

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

4.1 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA





4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Perwal No 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
- pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, untuk menyelenggarakan tugas berikut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1 pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan bidang pariwisata;
- 2 pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- 3 pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- 4 pengoordinasian penyelenggaraan daya tarik pariwisata;
- 5 pengoordinasian penyelenggaraan pengembangan sumber daya pariwisata;
- 6 pengoordinasian penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
- 7 pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan industri pariwisata;
- 8 penyelenggaraan prasarana zona kreatif/ruang kreatif pada industri pariwisata;
- 9 pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- 10 pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- 11 pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- 12 pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- 13 pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
- 14 pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 15 pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- 16 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.1.1 Sekretaris

Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan. Untuk menyelenggarakan tugas berikut, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- 1 pengoordinasian perencanaan program kerja Sekretariat;
- 2 pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
- 3 pengoordinasian pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- 4 membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan seksi;
- 5 pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- 6 pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
- 7 pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- 8 pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- 9 pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
- 10 pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- 11 pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- 12 pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Sekretariat;
- 13 pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 14 pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- 15 pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
- 16 pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat; dan
- 17 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.1.1.1 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas berikut, Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1 penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2 penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- 3 pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;
- 4 penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;
- 5 pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- 6 pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- 7 penyiapan bahan penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
- 8 penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- 9 pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- 10 pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 11 fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas;

- 12 fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Dinas;
- 13 pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 14 fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- 15 pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 16 pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 17 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Dinas.

4.2.1.1.2 Kepala Subbagian Keuangan

Kasubbag Keuangan mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas berikut, Kasubbag Keuangan mempunyai fungsi:

- 1 penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
- 2 penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan;
- 3 penatausahaan keuangan Dinas;
- 4 pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- 5 pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;
- 6 pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- 7 penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- 8 pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan;
- 9 pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan;
- 10 pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan;
- 11 pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
- 12 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.1.2 Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata

Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan daya tarik pariwisata. Untuk menyelenggarakan tugas berikut, Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata mempunyai fungsi:

- 1 pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
- 2 pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan daya tarik pariwisata;
- 3 pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
- 4 pengembangan daya tarik pariwisata;
- 5 penetapan, perencanaan, pengembangan dan evaluasi daya tarik pariwisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
- 6 pembinaan dan pengembangan atraksi wisata;
- 7 pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang pengembangan daya tarik pariwisata;
- 8 pengelolaan daya tarik dan prasarana pariwisata;
- 9 pembinaan pengelolaan daya tarik, kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
- 10 pengelolaan sarana dan prasarana kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
- 11 fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
- 12 pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang daya tarik pariwisata;
- 13 pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
- 14 pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
- 15 pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
- 16 pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
- 17 pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Daya Tarik Pariwisata; dan
- 18 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.1.3 Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi program di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata. Untuk menyelenggarakan tugas berikut, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai fungsi:

- 1 pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- 2 pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan sumber daya pariwisata;
- 3 pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- 4 pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- 5 pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- 6 pengembangan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
- 7 fasilitasi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
- 8 pemberdayaan ekonomi melalui peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- 9 pengembangan dan penguatan kelembagaan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat;
- 10 fasilitasi pengembangan kelembagaan pariwisata melalui jejaring kemitraan pariwisata;
- 11 pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- 12 pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- 13 pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- 14 pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- 15 pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata; dan
- 16 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.1.4 Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi program di bidang pemasaran pariwisata. Untuk menyelenggarakan tugas berikut, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

- 1 pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
- 2 pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pemasaran pariwisata;
- 3 pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
- 4 kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- 5 fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata bagi pengembangan sumber daya pariwisata daerah
- 6 kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam rangka promosi pariwisata;
- 7 misi promosi dan kerjasama pariwisata dalam negeri dan luar negeri;
- 8 fasilitasi dan kerjasama penyediaan prasarana zona kreatif/ruang kreatif pada industri pariwisata;
- 9 pelayanan informasi pariwisata;
- 10 pengelolaan website sistem informasi pariwisata;
- 11 analisa pasar wisatawan;
- 12 meningkatkan dan pengembangan pencitraan (branding) pariwisata;
- 13 pengoordinasian fasilitasi dan kerjasama penyediaan prasarana zona kreatif/ruang kreatif pada industri pariwisata;
- 14 pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Bidang Pemasaran Pariwisata;
- 15 pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
- 16 pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
- 17 pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
- 18 pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
- 19 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4.2.1.5 Kepala Bidang Industri Pariwisata

Kepala Bidang Industri Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi program di bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata. Untuk menyelenggarakan tugas berikut, Kepala Bidang Industri Pariwisata mempunyai fungsi:

- 1 pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- 2 pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pengawasan industri pariwisata;
- 3 pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- 4 pembinaan industri pariwisata;
- 5 fasilitasi dan penguatan kelembagaan usaha jasa pariwisata;
- 6 pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang usaha jasa pariwisata;
- 7 pengawasan industri pariwisata;
- 8 monitoring dan evaluasi industri pariwisata;
- 9 pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- 10 pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- 11 pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- 12 pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- 13 pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata; dan
- 14 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bab V Penutup

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target Rp 0,00 yang terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target;
- 2) Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target;
- 4) Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target.

5.1.2 Belanja

Realisasi belanja APBD per Desember Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 16.283.973,216 atau 95,77% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

5.1.2.a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 15.701.978.973,00 atau sebesar 96,41% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 4.939.466.000,00 terealisasi sebesar Rp4.707.479.987,00 atau 95,30% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 11.444.525.673,00 terealisasi sebesar Rp 10.994.498.986,00 atau sebesar 96,07% dari anggaran.

5.1.2.b. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 584.994.243,00 atau 93,68% dari anggaran. Belanja modal meliputi Belanja Peralatan dan

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan sebesar Rp 226.475.000,00 terealisasi sebesar Rp 218.056.660,00 atau 96,28% dari anggaran. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp 398.000.000 terealisasi sebesar Rp 366.937.583,00 atau sebesar 92,20% dari anggaran.

5.2 Neraca

5.2.1 Aset

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 2.037.152.432,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 111.088.222,00, Aset Tetap sebesar Rp 1.827.566.210,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp 98.498.000,00.

5.2.2 Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 119.042,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.3 Ekuitas

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp 2.037.033.390,00.

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO Juni tahun 2023 sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp 0,00.

5.3.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO Desember tahun 2023 sebesar Rp 16.218.535.343,82 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp 15.709.681.746,00 dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 508.772.597,82.

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Defisit dari Kegiatan Operasional Desember tahun 2023 sebesar Rp 16.218.535.343,82.

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp 2.456.028.027,05 merupakan ekuitas akhir tahun 2022.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO Desember tahun 2023 sebesar (Rp 16.218.535.343,82) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2023.

5.2.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi sebesar Rp 484.432.509,26 terdiri dari Ekuitas Mutasi Aset tetap sebesar Rp 232.369.200,00, Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp 247.125.181,94, Ekuitas Mutasi Aset Lainnya sebesar Rp 4.938.127,31, dan Ekuitas Mutasi

5.2.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp 2.037.033.390,00 merupakan ekuitas akhir Desember tahun 2023.

Kepala SKPD



Wahyu Hendratmoko, S.E, M.M.

NIP. 19741102 199803 1 004